UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KONSTRUKSI POLRI DI MASA REFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA
Muhammad Rafi Fadilah, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I 13
PENDAHULUAN 13
A. Latar Belakang 13
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan dan Signifikansi Studi 17
D. Ruang Lingkup dan Batasan Studi 18
E. Kerangka Teoritik 19
1. *Critical Discourse Analysis* (CDA) 20
2. Kekuasaan dan Koersi 24
3. Polisi dalam Demokrasi: Dari *Peelian Principles* hingga *Democratic Policing* 26
4. *Literature Review* dan Celah Penelitian 29
F. Kerangka Konseptual Penelitian 33
G. Metode Penelitian 36
1. Desain Penelitian 36
2. Teknik Pengumpulan Data 36
3. Teknik Analisis Data 40
4. Validitas dan Reliabilitas 42
H. Sistematika Penulisan 42
BAB II 44
JEJAK HISTORIS DAN KONSTRUKSI KELEMBAGAAN POLRI: 44
DARI WARISAN KOLONIAL HINGGA PASCA-REFORMASI 44
A. Akar Kolonial dan Pembentukan Watak Polisional Kepolisian di Indonesia 46
B. Reformasi 1998 dan Agenda Sivilisasi Polri 51
1. Konteks Reformasi 1998 dan Pemisahan Polri dari TNI 51
2. Prinsip-Prinsip Reformasi Polri dan Evaluasi terhadap UU No. 2 Tahun 2002 52

ANALISIS KONSTRUKSI POLRI DI MASA REFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA
Muhammad Rafi Fadilah, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Ekonomi-Politik Keamanan Pasca-Reformasi: Kekosongan Otoritas dan Ambivalensi Ekspektasi Publik 54
D. UU No. 2 Tahun 2002 dan Konstruksi Legal-Formal Polri sebagai Institusi Sipil 56
E. Depolitisasi, Repolitisasi, dan Permasalahan Akuntabilitas Polri 58
F. Konstruksi Citra, Legalitas, dan Krisis Legitimasi Publik 60
G. Analisis Teks dan Konstruksi Kekuasaan dalam UU No. 2 Tahun 2002 64
1. Konstruksi Fungsi Kepolisian dan Dominasi Wacana Kamtibmas 65
2. Konstruksi Tugas, Wewenang, dan Perluasan Ruang Tindakan Polri 67
3. Diskresi Kepolisian dan Legitimasi Tindakan Berdasarkan Penilaian Sendiri 68
4. Kedudukan Polri di Bawah Presiden dan Kerentanan Politisasi 70
5. Kompolnas dan Keterbatasan Pengawasan Eksternal 71
6. Ambivalensi UU Polri: Titik Keberhasilan dan Titik Berhentinya Patahan 73
BAB III 77
WACANA LEGALITAS, CITRA KELEMBAGAAN, DAN PRAKTIK KEKUASAAN POLRI PASCA REFORMASI 77
A. Konstruksi Wacana Legalitas dalam Komunikasi Kelembagaan Polri 79
1. Konstruksi Wacana Legalitas dalam Komunikasi Kelembagaan Polri 79
2. Nominalisasi dan Depersonalisasi Tindakan Koersif 82
3. Wacana Ancaman dan Konstruksi “Ketertiban” sebagai Nilai Tertinggi 83
B. Politik Citra dan Jargon Institusional Polri 85
C. Sikap dan Praktik Publik yang Ambivalen: Tuntutan Profesionalisme dan Reproduksi Ekonomi Informal Keamanan 95
D. Polri dalam Penanganan Aksi Massa: Arena Praktik Kekuasaan 98
E. Kontestasi Politik Elektoral 107
F. Sintesis Temuan 119
BAB IV 127
LEGALITY-MAKING DAN REPRODUKSI KEKUASAAN POLRI DALAM DEMOKRASI INDONESIA 127
A. Konstruksi Wacana Legalitas: Analisis Wacana Kritis atas Bahasa Kelembagaan Polri 128
1. *Description* (Analisis Tekstual): Mekanisme Linguistik *Legality-Making* 129
2. *Interpretation* (Analisis Pemrosesan): Produksi, Distribusi, dan Resepsi Wacana Keamanan 132
3. *Explanation* (Analisis Sosial): Konteks Struktural *Legality-Making* 134
B. Tiga Dimensi Kekuasaan Polri dalam Demokrasi Indonesia 137
1. Dimensi Pertama: Penggunaan Kekuatan sebagai Kekuasaan yang Terlihat 137

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS KONSTRUKSI POLRI DI MASA REFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA
Muhammad Rafi Fadilah, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Dimensi Kedua: Pengendalian Agenda melalui Definisi Ancaman dan Seleksi Isu 139

3. Dimensi Ketiga: Pembentukan Preferensi Publik dan Normalisasi Kepatuhan Legalistik 140

C. *Legality-Making* sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Institusional 142

1. *Legality-Making* sebagai Konsekuensi Patahan yang Tidak Tuntas 142

2. Citra Demokratis, Praktik Koersif: Paradoks Polri Pasca Reformasi 144

3. *Legality-Making* sebagai Medan Kontestasi Interdiskursif: Melampaui Model Monologis 145

4. Dua Jalur Pemulihan Orientasi Lama: Reartikulasi Non-Konfrontatif dan Normalisasi Praktik Menyimpang 149

D. Komparasi Lintas Konteks: Menguji Ketahanan Argumen Patahan yang Tidak Tuntas 150

E. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia 154

1. Defisit Legitimasi dan Kegagalan Sivilisasi Institusional 154

2. Penyempitan Ruang Sipil sebagai Konsekuensi *Legality-Making* 155

3. Reproduksi Otoritarianisme Residual dalam Demokrasi Elektoral 156

F. Evaluasi melalui *Peelian Principles*: Polri tanpa *Public Consent* 157

1. Ukuran *Peelian*: Kepercayaan Publik sebagai Sumber Legitimasi 157

2. Jarak antara Standar *Peelian* dan Praktik Polri 158

3. Reformasi yang Dibutuhkan: Melampaui *Legality-Making* 160

G. Kesimpulan Bab IV 162

BAB V 164

PENUTUP 164

A. Simpulan 164

B. Refleksi Teoritis 170

DAFTAR PUSTAKA 175